



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAGIMIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. NHK : 802896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 845 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/60 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **135.000.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **7.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **404.456**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.442.404.456**

III. HUTANG **Rp.** **870.945.600**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.571.458.856

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.